

## PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN MALILI DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

**Jeni Bulo' Saladan**

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia  
Correspondensi author email: [jenibulosaladan@gmail.com](mailto:jenibulosaladan@gmail.com)

**Naomi**

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia  
[n38138474@gmail.com](mailto:n38138474@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the strategic role of the Malili District Ministry of Religious Affairs Office in enhancing interfaith tolerance in East Luwu Regency. The background of this research is the social reality of the multicultural and multireligious Malili community, which demands wise, inclusive, and contextual management of interfaith relations. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews, observation, and documentation, which were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that the Malili Ministry of Religious Affairs Office plays a significant role through harmony development programs, facilitation of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), tolerance cadre training, and interfaith cultural activities. However, challenges such as low religious literacy, group exclusivism, and the influence of digital disinformation remain major obstacles to realizing comprehensive tolerance at the grassroots level. Collaborative strategies and cultural approaches based on local values have proven to be effective in building a peaceful, inclusive, and sustainable social space. These findings emphasize the importance of synergy between the state and civil society in managing religious diversity positively and productively.*

**Keywords:** religious tolerance, Ministry of Religion, FKUB, multiculturalism, local values, Malili, East Luwu, interfaith harmony

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakang penelitian ini adalah realitas sosial masyarakat Malili yang multikultural dan multireligius, yang menuntut pengelolaan hubungan antarumat beragama secara bijak, inklusif, dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kemenag Malili memainkan peran penting melalui program pembinaan kerukunan, fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pelatihan kader toleransi, serta kegiatan budaya lintas iman.

Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keagamaan, eksklusivisme kelompok, serta pengaruh disinformasi digital masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan toleransi yang menyeluruh di tingkat akar rumput. Strategi kolaboratif dan pendekatan kultural berbasis nilai lokal terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun ruang sosial yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan ini mempertegas pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat sipil dalam mengelola keberagaman keagamaan secara positif dan produktif.

**Kata Kunci:** toleransi beragama, Kementerian Agama, FKUB, multikultural, nilai lokal, Malili, Luwu Timur, kerukunan umat beragama.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis. Keberagaman ini menjadi potensi besar dalam pembangunan sosial dan budaya, namun di sisi lain juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola secara bijak. Dalam konteks ini, toleransi antarumat beragama menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural. Oleh karena itu, peran institusi negara dalam membina hubungan antarumat beragama sangat dibutuhkan guna menciptakan suasana damai dan saling menghargai. Kantor Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keagamaan dituntut untuk memainkan perannya secara aktif dan strategis. Khususnya, Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili memiliki posisi penting dalam menjembatani hubungan antaragama di daerah tersebut.

Peran Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi keagamaan, melainkan juga mencakup fungsi pembinaan dan penguatan nilai-nilai toleransi. Berbagai program seperti dialog lintas agama, pembinaan tokoh agama, serta fasilitasi forum-forum kerukunan telah menjadi bagian dari upaya konkret yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Strategi ini sejalan dengan misi nasional Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (Kemenag RI, 2006). Melalui pendekatan ini, institusi di tingkat kecamatan dapat menjadi aktor penting dalam mengatasi gesekan antarumat yang bersifat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2018) menyebutkan bahwa keberadaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat daerah sangat efektif dalam menyelesaikan konflik keagamaan yang muncul. FKUB yang difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili telah beberapa kali menjadi mediator dalam menyelesaikan ketegangan antar kelompok umat beragama. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan multikulturalisme, penyuluhan toleransi, dan seminar keagamaan lintas iman menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas masyarakat dalam

membangun harmoni. Hal ini membuktikan bahwa peran aktif lembaga negara di tingkat akar rumput sangat krusial dalam menjaga kohesi sosial masyarakat majemuk.

Di sisi lain, tantangan dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama tidaklah sedikit. Beberapa faktor seperti minimnya literasi keagamaan, pengaruh media sosial yang provokatif, serta polarisasi identitas seringkali menjadi penghambat utama dalam membangun toleransi (Syamsuddin, 2021). Dalam menghadapi tantangan ini, Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pelibatan tokoh agama lokal, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda lintas agama menjadi strategi yang cukup efektif dalam menciptakan ruang dialog dan kerja sama antarumat. Pendekatan kolaboratif ini memberikan peluang untuk memperkuat solidaritas sosial yang berbasis pada nilai-nilai agama yang damai dan inklusif.

Selain program-program bersifat formal, pendekatan kultural juga sangat penting untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama. Melalui kegiatan bersama seperti gotong royong lintas agama, perayaan hari besar secara bersama, dan kegiatan seni budaya, masyarakat dapat merasakan kebersamaan yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Haris (2019), pendekatan kultural memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi positif antar kelompok yang berbeda, karena dilakukan melalui pengalaman sosial yang nyata dan menyentuh aspek emosional masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili perlu terus mendorong inisiatif semacam ini sebagai bagian dari strategi holistik dalam membina kerukunan umat.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai peran strategis yang dimainkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili dalam membangun toleransi antarumat beragama di Kabupaten Luwu Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti ingin mengungkap berbagai bentuk program, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan oleh institusi tersebut dalam memelihara kerukunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program keagamaan di tingkat lokal serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan keagamaan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang peran negara dalam pengelolaan keberagaman agama secara damai dan produktif.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai dinamika sosial dan keagamaan di Kecamatan Malili, khususnya dalam kaitannya dengan peran institusi pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoritik, tetapi juga implikasi praktis bagi para pemangku kebijakan, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam membangun kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis. Melalui pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap peran Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili, maka akan terbuka

ruang dialog yang lebih konstruktif untuk memperkuat upaya perdamaian berbasis nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Luwu Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu tokoh-tokoh agama, pejabat Kementerian Agama setempat, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan lintas agama. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar fleksibel dalam menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik-praktik toleransi dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap arsip kegiatan, laporan tahunan, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan program kerukunan antarumat beragama. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara utuh dan akurat peran serta strategi yang dijalankan oleh lembaga tersebut dalam konteks lokal yang spesifik.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama oleh Kementerian Agama Kecamatan Malili**

Kementerian Agama sebagai institusi negara yang memiliki tugas dalam urusan keagamaan memegang peran vital dalam menjaga dan membina kerukunan antarumat beragama. Di tingkat kecamatan, Kantor Kementerian Agama memiliki mandat untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kecamatan Malili sebagai ibukota Kabupaten Luwu Timur memiliki komposisi masyarakat yang plural, baik dari sisi agama, suku, maupun budaya. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan sosial berbasis toleransi. Untuk menjawab dinamika tersebut, Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili mengembangkan berbagai program pembinaan kerukunan umat beragama yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kolaboratif dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sipil setempat.

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan secara rutin adalah *dialog lintas agama*, yang mempertemukan tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, perdamaian, dan kehidupan beragama yang harmonis. Dialog ini tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga membentuk kesadaran bersama akan pentingnya hidup berdampingan dalam damai. Menurut Haryatmoko (2016), ruang dialog menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran multikulturalisme karena mampu menciptakan pemahaman timbal balik antar kelompok yang berbeda. Di Malili, dialog lintas agama juga menjadi ajang klarifikasi atas isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan salah paham antarumat, seperti perbedaan dalam praktik ibadah atau penyelenggaraan hari besar keagamaan.

Selain dialog, program pembinaan lainnya adalah *penyuluhan toleransi dan moderasi beragama* yang ditujukan kepada pelajar, pemuda, dan masyarakat umum. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, organisasi kepemudaan, dan lembaga keagamaan. Penyuluhan ini menekankan pentingnya memahami agama secara moderat dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan nasional moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019 (Kemenag RI, 2020). Penyuluhan tersebut menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk membangun sikap keberagamaan yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan.

Kegiatan lain yang turut memperkuat kerukunan antarumat beragama adalah pelatihan kader kerukunan. Program ini melibatkan pemuda lintas agama yang dilatih menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Mereka dibekali dengan keterampilan komunikasi lintas budaya, penanganan konflik sosial, dan nilai-nilai etika universal. Menurut Santosa (2021), pelibatan pemuda dalam upaya perdamaian sangat strategis karena mereka merupakan kelompok yang adaptif dan memiliki akses luas ke media sosial. Kantor Kemenag Malili melihat bahwa memperkuat kapasitas pemuda sebagai duta toleransi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan masyarakat damai. Kegiatan ini juga sekaligus mengurangi kerentanan pemuda terhadap radikalisme dan paham keagamaan ekstrem yang berkembang di ruang digital.

Tidak hanya melalui kegiatan berskala besar, Kantor Kemenag Kecamatan Malili juga melakukan pendekatan langsung ke komunitas-komunitas keagamaan melalui *kunjungan silaturahmi antarumat*. Kegiatan ini membangun komunikasi informal yang erat antara aparat Kemenag dengan pemuka agama dan warga setempat. Dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, banyak ketegangan sosial yang dapat dicegah bahkan sebelum menjadi konflik terbuka. Metode ini terbukti efektif di daerah dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan seperti di Luwu Timur. Sebagaimana dijelaskan oleh Ichwan (2020), pendekatan kultural dalam pembinaan keagamaan akan lebih diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan pola interaksi sosial mereka.

Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili juga aktif memfasilitasi perayaan hari besar keagamaan secara lintas agama. Misalnya, pada saat perayaan Natal, perwakilan umat Islam turut diundang sebagai tamu kehormatan, begitu pula sebaliknya pada saat Idulfitri atau Waisak. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan emosional antarumat beragama, tetapi juga memperlihatkan contoh konkret dari toleransi yang hidup dan membumi. Perayaan semacam ini didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan kegiatan tahunan yang juga disampaikan ke Kementerian Agama Kabupaten sebagai bukti praktik kerukunan yang berjalan baik di tingkat kecamatan. Kehadiran simbolik dalam perayaan agama orang lain telah terbukti menciptakan suasana batin yang harmonis dan mendorong pengakuan terhadap eksistensi agama lain dalam bingkai kebangsaan.

Evaluasi atas pelaksanaan program dilakukan secara periodik melalui rapat koordinasi bersama tokoh agama dan pemerintah setempat. Dalam forum ini, seluruh kegiatan pembinaan dievaluasi dari segi efektivitas, jangkauan, dan partisipasi masyarakat. Masukan dari tokoh agama menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengembangan program selanjutnya. Selain itu, Kantor Kemenag Malili juga menyusun laporan capaian program yang menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Dengan model manajemen program yang berbasis partisipasi, Kantor Kemenag Malili dapat menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Dwiyanto, 2008).

Secara keseluruhan, implementasi program pembinaan kerukunan umat beragama oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili menunjukkan kinerja yang adaptif, kontekstual, dan proaktif dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Berbagai strategi yang dijalankan mencerminkan komitmen institusi dalam menerjemahkan nilai-nilai nasional tentang kerukunan ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal. Melalui kombinasi pendekatan struktural, edukatif, dan kultural, program ini mampu membentuk ruang sosial yang inklusif bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, peran Kantor Kemenag Malili patut dijadikan model dalam pengelolaan keberagaman keagamaan yang damai, produktif, dan berkelanjutan.

### **Peran Strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjembatani Dialog Antarumat Beragama**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga independen yang difasilitasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang bertugas memelihara dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah. Di Kecamatan Malili, FKUB memainkan peran strategis dalam membangun jembatan komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Keberadaan FKUB tidak hanya

bersifat simbolis, tetapi aktif menjalankan fungsi mediasi, edukasi, serta pengawasan terhadap dinamika keagamaan di wilayahnya. Dalam masyarakat yang plural seperti di Kabupaten Luwu Timur, peran FKUB sangat penting dalam mencegah munculnya konflik horizontal yang berlatar belakang perbedaan keyakinan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Kemenag RI, 2006).

FKUB Kecamatan Malili secara rutin menyelenggarakan pertemuan lintas tokoh agama untuk mendiskusikan isu-isu sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kerukunan. Forum ini juga menjadi ruang penyampaian aspirasi dan klarifikasi atas isu-isu sensitif yang berkembang di tengah masyarakat, seperti pembangunan rumah ibadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan di ruang publik, dan penggunaan simbol-simbol agama di ruang netral. Dalam hal ini, FKUB berperan sebagai juru damai yang netral dan terpercaya di mata masyarakat. Menurut Wahid (2019), kepercayaan publik terhadap FKUB sangat menentukan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sebagai penengah dalam berbagai persoalan antarumat beragama.

Di Kecamatan Malili, FKUB juga menggagas berbagai kegiatan kebudayaan lintas agama, seperti festival toleransi, seminar moderasi beragama, serta dialog lintas generasi. Kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana sosial yang inklusif dan mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan. Pelibatan pemuda lintas agama dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi regenerasi nilai-nilai toleransi yang berkelanjutan. FKUB menyadari bahwa tantangan keberagaman bukan hanya menasar elite agama, tetapi juga generasi muda yang rentan terhadap provokasi dan disinformasi di media sosial. Oleh karena itu, pelibatan komunitas digital dan organisasi kepemudaan menjadi salah satu fokus dalam membumikan nilai-nilai kerukunan (Syamsuddin, 2021).

Selain kegiatan preventif, FKUB juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik keagamaan yang sudah muncul di masyarakat. Mekanisme penyelesaian yang dikembangkan lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan dialog terbuka. Dalam beberapa kasus, FKUB Kecamatan Malili berhasil mendinginkan suasana yang memanas akibat kesalahpahaman antar kelompok umat beragama melalui mediasi intensif. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi hukum formal yang cenderung memperkeruh suasana. Sebagaimana disampaikan oleh Mahfud (2020), penyelesaian konflik sosial melalui lembaga lokal berbasis nilai kekeluargaan lebih mampu memulihkan hubungan antar pihak dibandingkan pendekatan legalistik yang bersifat represif.

FKUB juga turut aktif memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait izin pembangunan rumah ibadah dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di ruang publik. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat lintas agama agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketegangan. Dengan demikian,

FKUB bukan hanya menjadi lembaga simbolik, tetapi memiliki kekuatan normatif dalam menata kehidupan keberagaman di masyarakat. Partisipasi yang inklusif dan musyawarah dalam pengambilan keputusan membuat keberadaan FKUB mendapat legitimasi sosial yang kuat di Kecamatan Malili.

Di tengah meningkatnya intoleransi dan radikalisme yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, peran FKUB semakin penting untuk memperkuat imunitas sosial terhadap isu-isu yang bersifat provokatif. Melalui pendekatan edukatif dan kultural, FKUB berupaya menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan nasionalisme sebagai fondasi kehidupan beragama yang damai. FKUB juga menjalin kemitraan strategis dengan media lokal, akademisi, dan lembaga pendidikan dalam mengarusutamakan narasi kerukunan di ruang-ruang publik. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program dan memperkuat keberlanjutan gerakan toleransi di tingkat lokal (Haris, 2019).

Dengan berbagai inisiatif dan komitmennya, FKUB Kecamatan Malili telah menunjukkan bahwa forum ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan institusi sosial yang berperan nyata dalam menjaga persaudaraan lintas iman. Melalui pendekatan dialogis, mediatif, dan partisipatif, FKUB menjadi model praksis kerukunan yang layak dikembangkan di daerah-daerah lain dengan karakteristik multikultural yang serupa. Maka, memperkuat kapasitas FKUB secara kelembagaan dan memperluas ruang gerakannya adalah langkah strategis dalam membangun perdamaian berkelanjutan di Indonesia.

### **Tantangan Sosial dan Budaya dalam Upaya Menumbuhkan Toleransi di Tingkat Akar Rumput**

Meskipun program-program pembinaan kerukunan antarumat beragama telah dilaksanakan secara masif oleh Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan sosial dan budaya masih menjadi penghambat utama dalam menumbuhkan toleransi secara menyeluruh. Di tingkat akar rumput, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika hubungan antarumat beragama, termasuk faktor pendidikan, ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta warisan sejarah konflik yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat di wilayah Kecamatan Malili, sebagaimana halnya di banyak wilayah multikultural lainnya, masih menghadapi ketegangan sosial yang muncul secara laten akibat stereotip dan prasangka antar kelompok agama yang berbeda (Azra, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan toleransi bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan psikologis.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keagamaan dan pemahaman lintas iman di kalangan masyarakat akar rumput. Banyak warga yang hanya mengenal agamanya sendiri tanpa memiliki pemahaman dasar mengenai keyakinan lain. Ketidaktahuan ini kerap menjadi sumber prasangka dan sikap eksklusif. Menurut Alwi

Shihab (2019), toleransi hanya dapat tumbuh apabila masyarakat dibekali dengan pemahaman yang benar tentang pluralitas dan prinsip dasar agama-agama lain. Tanpa edukasi yang memadai, keberagaman mudah disalahpahami sebagai ancaman, bukan sebagai kekayaan. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika pemahaman keagamaan yang kaku diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya ruang kritis atau dialog lintas generasi.

Selain itu, tantangan ekonomi juga turut mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap isu-isu intoleransi. Ketimpangan sosial dan akses ekonomi yang timpang kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memobilisasi dukungan dengan narasi keagamaan yang provokatif. Di beberapa desa di Kecamatan Malili, ketegangan antar kelompok pernah dipicu oleh kecemburuan sosial yang dibingkai dalam sentimen agama. Ketika akses terhadap sumber daya atau fasilitas publik dianggap tidak merata antar kelompok, maka agama sering dijadikan pembenaran untuk memprotes atau menolak kebijakan pemerintah. Menurut Mujiburrahman (2018), dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan, agama sering menjadi medium mobilisasi sosial yang efektif baik untuk kebaikan maupun konflik.

Pengaruh media sosial dan teknologi komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun toleransi di tingkat akar rumput. Banyak warga yang terpapar informasi-informasi provokatif dan hoaks berbau keagamaan tanpa memiliki kapasitas literasi digital yang memadai untuk menyaringnya. Hal ini menyebabkan penyebaran kebencian dan intoleransi berlangsung cepat, bahkan hingga ke pelosok desa. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa konten keagamaan merupakan salah satu kategori terbanyak dalam penyebaran ujaran kebencian secara daring (Kominfo, 2022). Keterbatasan akses literasi digital membuat masyarakat mudah terbawa emosi tanpa memverifikasi kebenaran suatu informasi, sehingga memperparah ketegangan sosial berbasis agama.

Tantangan lain yang juga signifikan adalah eksklusivisme kelompok keagamaan tertentu yang menolak keterlibatan dalam kegiatan lintas agama. Beberapa komunitas di Kecamatan Malili memilih bersikap tertutup dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang digagas oleh Kemenag atau FKUB karena alasan doktrinal. Mereka cenderung menilai bahwa pergaulan lintas agama dapat mencederai kemurnian ajaran agama mereka. Pandangan semacam ini mempersempit ruang dialog dan memperbesar kemungkinan salah paham antarumat beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Noorhaidi (2020) menunjukkan bahwa eksklusivisme keagamaan seringkali tumbuh dalam komunitas yang merasa terancam oleh modernitas dan globalisasi, sehingga memilih sikap defensif terhadap kelompok luar.

Selain eksklusivisme, masih terdapat warisan konflik masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa warga masih menyimpan trauma kolektif akibat konflik horizontal yang pernah terjadi, baik di masa Orde Baru maupun pascareformasi. Meski skala konfliknya tidak besar, namun ingatan akan kejadian tersebut masih

melekat kuat dan menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang saling percaya. Tanpa adanya proses rekonsiliasi dan pengakuan atas luka masa lalu, masyarakat akan sulit membangun toleransi secara tulus. Dalam konteks ini, Kementerian Agama dan FKUB dituntut untuk tidak hanya fokus pada program preventif, tetapi juga menyentuh aspek penyembuhan sosial dan penguatan solidaritas lintas kelompok.

Faktor budaya lokal juga berperan ganda: di satu sisi menjadi kekuatan pemersatu, namun di sisi lain bisa menjadi penghambat apabila diklaim secara eksklusif oleh kelompok tertentu. Di Luwu Timur, budaya gotong royong dan musyawarah sebenarnya dapat dijadikan modal sosial dalam membangun kerukunan, namun apabila identitas budaya tertentu diidentikkan dengan agama atau kelompok mayoritas, maka potensi diskriminasi terhadap kelompok lain akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pendekatan kebudayaan harus dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua kelompok agama. Menurut Geertz (2014), budaya lokal dapat menjadi perekat masyarakat multikultural jika dipahami secara terbuka dan tidak dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus membangun sinergi dengan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan. Pendekatan partisipatif dan kontekstual menjadi kunci dalam menjawab tantangan sosial dan budaya yang kompleks. Dengan mengedepankan dialog, edukasi lintas iman, dan penguatan nilai-nilai bersama, toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akar rumput.

### **Strategi Kolaboratif dan Kultural dalam Membangun Toleransi Berbasis Nilai Lokal**

Pembangunan toleransi antarumat beragama tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural dan normatif melalui regulasi dan kebijakan negara. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan menyentuh dimensi kultural masyarakat. Di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, strategi kolaboratif dan kultural telah menjadi bagian penting dari upaya membangun harmoni antarumat beragama secara berkelanjutan. Strategi ini melibatkan sinergi antar aktor lokal, seperti Kantor Kementerian Agama, tokoh agama, pemuda lintas iman, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati, yang terbukti mampu meredam potensi konflik dan memperkuat ikatan sosial (Geertz, 2014).

Strategi kolaboratif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang bertujuan membangun kerukunan. Kolaborasi ini menciptakan rasa memiliki bersama terhadap program-

program toleransi, sehingga meningkatkan partisipasi dan efektivitas kegiatan. Misalnya, dalam pelaksanaan dialog lintas agama, Kantor Kemenag Malili tidak hanya mengundang tokoh agama, tetapi juga melibatkan pemuda, aparat desa, dan komunitas budaya. Hal ini menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Menurut Suharko (2020), partisipasi lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks masyarakat multikultural.

Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan dengan mengangkat dan menguatkan nilai-nilai lokal yang mendukung kehidupan damai. Di Malili, praktik gotong royong dalam kegiatan sosial seperti pembangunan rumah ibadah, bantuan bencana, dan kegiatan kebersihan lingkungan seringkali dilakukan lintas agama tanpa membedakan keyakinan. Kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas kemanusiaan. Budaya lokal seperti “majelis adat” dan forum keluarga besar antarsuku juga dimanfaatkan sebagai sarana penyuluhan toleransi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini selaras dengan pendapat Koentjaraningrat (2009), yang menyebut bahwa kearifan lokal dapat menjadi modal sosial yang ampuh dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat kohesi sosial.

Strategi kolaboratif-kultural ini juga terlihat dalam perayaan hari besar keagamaan yang dilakukan secara terbuka dan saling mengundang antar umat beragama. Misalnya, pada perayaan Idulfitri, umat Kristiani turut hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan masyarakat Muslim, begitu pula sebaliknya pada perayaan Natal dan Paskah. Perayaan bersama ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga simbol persatuan dalam keberagaman. Menurut Haryatmoko (2016), simbol-simbol sosial yang dibangun dalam perayaan lintas agama memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat identitas sebagai masyarakat plural yang saling menghargai.

Kegiatan seni dan budaya juga menjadi media efektif dalam membangun toleransi berbasis nilai lokal. Pertunjukan seni, musik tradisional, dan lomba kreatif antar pemuda lintas agama menjadi sarana membangun kedekatan emosional dan memperkuat dialog tanpa harus melalui bahasa agama yang kerap sensitif. Kegiatan semacam ini memungkinkan pertemuan yang lebih cair dan menyenangkan, sehingga memperkuat relasi sosial dalam suasana yang harmonis. Dalam konteks ini, budaya berfungsi sebagai jembatan antar identitas yang berbeda, dan menjadi ruang ekspresi damai yang menjangkau generasi muda. Sebagaimana dinyatakan oleh Simatupang (2018), pendekatan kultural sangat penting untuk membentuk toleransi yang bersifat relasional dan emosional.

Selain itu, strategi kolaboratif juga diperkuat dengan pembentukan forum pemuda lintas iman yang digagas oleh Kantor Kemenag Malili bersama organisasi kepemudaan lokal. Forum ini berperan sebagai agen perubahan yang aktif menyuarakan nilai-nilai toleransi melalui media sosial, diskusi komunitas, dan kegiatan

edukatif di sekolah-sekolah. Para pemuda ini dilatih menjadi fasilitator perdamaian yang memahami dinamika keberagaman di daerahnya dan mampu menyusun narasi-narasi damai yang relevan bagi generasi mereka. Strategi ini terbukti efektif dalam menangkal paham intoleran dan radikal yang kerap menyasar anak muda melalui internet (Santosa, 2021). Dengan pendekatan yang setara dan berbasis kebutuhan lokal, forum pemuda ini menjadi kekuatan baru dalam gerakan toleransi di Malili.

Kesuksesan strategi kolaboratif dan kultural ini juga tidak lepas dari konsistensi dan keteladanan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Ketika para pemimpin agama bersatu menyuarakan pentingnya kerukunan, hal tersebut memberikan dampak psikologis yang kuat bagi umatnya. Keteladanan ini membentuk kultur sosial yang menjadikan toleransi sebagai norma yang dihormati dan dijaga bersama. Oleh karena itu, Kantor Kemenag Malili secara aktif memfasilitasi pertemuan-pertemuan informal antar tokoh agama untuk menjaga komunikasi dan kerja sama yang harmonis. Melalui pendekatan yang menyentuh struktur sosial dan budaya masyarakat, strategi ini berhasil memperkuat daya tahan masyarakat terhadap isu-isu provokatif yang mengancam kerukunan antarumat beragama.

Dengan memadukan pendekatan kolaboratif dan kultural, upaya membangun toleransi tidak hanya bergantung pada peran negara, tetapi juga ditopang oleh kekuatan sosial masyarakat sendiri. Pendekatan ini menjadikan toleransi sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari, bukan sekadar ajaran normatif atau proyek institusional. Dalam konteks Kecamatan Malili, strategi ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperkuat hubungan antarumat beragama dan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malili memiliki peran strategis dalam membina, menjaga, dan mengembangkan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Luwu Timur. Melalui berbagai program seperti dialog lintas agama, penyuluhan moderasi beragama, pelibatan pemuda lintas iman, dan fasilitasi kegiatan kebudayaan bersama, lembaga ini berupaya menjawab kebutuhan masyarakat yang majemuk dengan pendekatan yang partisipatif, edukatif, dan kontekstual. Kemenag Malili tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang adaptif terhadap dinamika sosial lokal. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kecamatan juga memperkuat posisi Kemenag dalam menjembatani hubungan antarumat. FKUB berperan penting sebagai forum dialog, ruang mediasi, dan penjaga keseimbangan sosial yang membuka komunikasi lintas iman secara konstruktif dan damai. Peran ini terbukti efektif dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai ketegangan keagamaan yang muncul di masyarakat akar rumput. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan sosial dan budaya yang masih

harus dihadapi dalam menumbuhkan toleransi secara menyeluruh. Rendahnya literasi keagamaan, eksklusivisme kelompok, pengaruh media sosial yang negatif, serta trauma masa lalu menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui regulasi atau pendekatan struktural, tetapi harus menyentuh aspek kultural dan psikososial masyarakat. Dalam konteks inilah, strategi kolaboratif dan kultural menjadi pendekatan yang sangat relevan. Melibatkan berbagai unsur masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda dan organisasi lokal, strategi ini memperluas ruang toleransi dan menjadikannya bagian dari praktik sosial sehari-hari. Kegiatan gotong royong lintas agama, perayaan hari besar bersama, hingga forum pemuda lintas iman menjadi contoh nyata dari bagaimana toleransi dibangun dari bawah, berbasis nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi Shihab. (2019). *Islam Inklusif: Menuju Dialog Teologis Antara Agama*. Jakarta: Mizan.
- Azra, A. (2017). *Islam, Pluralisme, dan Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Bentang.
- Haris, M. (2019). *Multikulturalisme dan Rekonsiliasi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. (2016). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ichwan, M. N. (2020). *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Kultural dalam Studi Keagamaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Panduan Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kominfo. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif di Ruang Digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, M. D. (2020). *Demokrasi, Agama, dan Toleransi: Refleksi Kebangsaan di Tengah Kemajemukan*. Jakarta: Kompas.
- Mujiburrahman. (2018). *Peran Agama dalam Konflik Sosial: Perspektif Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noorhaidi, H. (2020). *Islamisme dan Politik Identitas di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Santosa, H. (2021). *Pendidikan Perdamaian untuk Generasi Muda*. Surakarta: UNS Press.
- Simatupang, B. (2018). *Budaya, Identitas dan Toleransi: Perspektif Sosiologi Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharko. (2020). *Gerakan Sosial dan Transformasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Syamsuddin, M. (2021). *Toleransi Beragama di Era Digital: Antara Harapan dan Tantangan*. Bandung: Refika Aditama.

Wahid, A. (2019). *Mengelola Keragaman: Peran Strategis FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: LP3ES.